

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.1.1 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn

4.1.1.1 Efektivitas

Kebijakan yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan sampah dinilai belum efektif karena tidak mampu mencapai tujuan pengurangan sampah. Pada tahun 2024 capaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Semarang dalam pengurangan sampah mencapai 27,67%, sedangkan target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang tahun 2021-2026 mencapai 28%.

4.1.1.2 Efisiensi

Kebijakan ini dinilai belum efisien karena anggaran pemeliharaan TPST maupun TPS3R menggunakan hasil operasional dari pengelolaan sampah sehingga jumlah TPST maupun TPS3R yang aktif di Kota Semarang menjadi berkurang. Selain itu, teknologi pengelolaan sampah sama sekali belum diterapkan pada TPS, meskipun pada TPST maupun TPS3R sudah diterapkan teknologi berupa pemilahan, pengomposan,

budidaya magot, pencacahan, dan pengepresan. Sedangkan teknologi pada TPA Jatibarang berupa sanitary landfill masih mengalami kegagalan.

4.1.1.3 Kecukupan

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah dinilai belum cukup karena jumlah TPS yang ada saat ini tidak ideal, dimana jumlah TPS yang tersedia di Kota Semarang sebanyak 254 TPS sedangkan jumlah TPS yang ideal sebanyak 396 TPS. Selain itu, fasilitas pada TPS, TPST, TPA juga belum mencukupi karena fasilitas TPS tidak dilengkapi peralatan untuk mengelola sampah seperti di TPST maupun TPS3R, sedangkan fasilitas di TPA masih kekurangan alat berat untuk mengelola sampah.

4.1.1.4 Pemerataan

Kebijakan dalam pengelolaan sampah belum dilakukan secara merata karena tempat penampungan sampah belum tersebar disemua kelurahan. Masih terdapat kelurahan yang mengumpulkan sampah ke TPS yang berada di kelurahan terdekatnya. Selain itu, persebaran informasi melalui sosialisasi belum diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat di Kota Semarang sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi pengelolaan sampah.

4.1.1.5 Responsivitas

Responsivitas dari pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah baik karena dinas lingkungan hidup memastikan semua tumpukan sampah di Kota Semarang mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah. Dinas lingkungan hidup melakukan koordinasi dengan UPTD dimasing-masing

wilayah dan membentuk tim pasukan gerak cepat untuk memastikan semua sampah mendapatkan pengangkutan. Selain itu, dinas lingkungan hidup merespon keluhan dari masyarakat terkait bau yang tidak sedap pada tempat penampungan sampah. Dinas lingkungan hidup memberikan semprotan eco enzym pada tempat penampungan sampah dan lokasi disekitarnya supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

4.1.1.6 Ketepatan

Kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan belum dikatakan tepat sasaran karena masih banyak hal-hal yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal dalam pengelolaan sampah. Sasaran dari kebijakan untuk mengurangi jumlah sampah dan menangani sampah yang ada di Kota Semarang belum bisa terealisasi.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

4.1.2.1 Sumber Daya

Sumber daya dalam penelitian ini berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan pengelolaan sampah dari segi kuantitas dan kualitas sudah mencukupi sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah. Namun, sumber daya finansial yang dimiliki pelaksana kebijakan dikatakan belum cukup karena banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi sehingga menjadi faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sampah.

4.1.2.2 Keterbukaan

Data dan informasi mengenai pengelolaan sampah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dinas lingkungan hidup menyajikan data dan informasi pengelolaan sampah melalui media internet maupun media masa yang dimilikinya. Media internet yang digunakan berupa website, sedangkan media sosial yang digunakan berupa instagram. Hal ini menunjukkan kemudahan akses dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan ringkasan penelitian yang telah dijelaskan diatas, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih mendapatkan hambatan. Oleh karena itu, saran yang diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Dinas lingkungan hidup Kota Semarang melakukan pengecekan secara rutin ke TPS, TPST, TPA untuk melihat kondisi tempat, memperbaiki kerusakan dan melengkapi fasilitas yang belum dimiliki pada tempat tersebut.
2. Dinas lingkungan hidup Kota Semarang meningkatkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.
3. Dinas lingkungan Hidup Kota Semarang memberikan pendampingan kepada kelompok swadaya masyarakat supaya melakukan pengelolaan sampah dengan tepat.

4. Dinas lingkungan hidup menerapkan teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi bahan bangunan seperti paving blok, genteng, batu bata.